

Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Kaltim Dan Tantangan Sebagai Penyangga IKN



Disusun Oleh: Ir. Suyadi, MS., Ph.D.

Dewan Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda 2021

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah laporan kegiatan 2021 Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur ini telah dapat disusun. Laporan ini disusun berdasarkan kondisi perkembangan ketahanan pangan di Kalimantan Timur selama tahun 2021 dan mengikuti kecenderungan perkembangan pada tahun-tahun sebelumnya. Termasuk informasi terakhir dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan Tanggal 21-23 Nopember 2021 di Kabupaten Berau.

Fokus informasi yang disajikan dalam laporan adalah kondisi aktual ketahanan pangan di Kalimantan Timur yang berkaitan dengan Pilar Pemanfaatan dan Ketersediaan Pangan. Kemudian diikuti dengan uraian tentang strategi peningkatan ketahanan pangan, yang ditinjau dari aspek alamiah, sosio-kultural dan kebijakan pembangunan. Pada bagian akhir, sesuai dengan kondisi aktual saat ini, disajikan uraian tentang berbagai tantangan yang dihadapi Kalimantan Timur untuk mempersiapkan diri sebagai penyangga kebutuhan pangan IKN.

Demikian laporan ini disampaikan, dengan harapan dapat menjadi bahan informasi bagi para pihak yang berkepentingan dan berperan dalam kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Sehingga kita dapat mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di Kalimantan Timur secara mandiri dan berdaulat pangan.

Samarinda, Desember 2021
Penyusun,

Anggota DKP Kalimantan Timur.

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	1
1.1. Tujuan	3
1.2. Luaran	4
2. Kondisi Aktual Ketahanan Pangan	4
2.1. Pilar Pemnafaatan Pangan	5
2.2. Pilar Ketersediaan Pangan	7
3. Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan	10
3.1. Aspek Alamiah	12
3.2. Aspek Sosio-kultural	14
3.3. Aspek Kebijakan	16
4. Tantangan Sebagai Penyangga IKN	18

1. Pendahuluan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-undang No18/2012). Secara umum status ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir termasuk kriteria tahan pangan, dengan skor 76,90 pada tahun 2019 dan naik menjadi 78,24 pada tahun 2020, tetapi rangkingnya justru menurun dari ranking 7 pada tahun 2019 menjadi ranking 9 pada tahun 2020.

Namun bilamana di pilah berdasarkan IKP (indeks ketahanan pangan) kabupaten dan kota, masih ada tiga kabupaten di Kalimantan Timur yang termasuk zona merah, yaitu Kabupaten Mahakam Hulu, Kutai Barat, dan Kutai Timur. Perkembangan IKP untuk ketiga kabupaten tersebut dalam kurun waktu 2019-2020 adalah sebagai berikut, Indeks ketahanan Pangan Kabupaten Mahakam Hulu meningkat dari ranking 350 (dengan skor 58,73) menjadi ranking 337 (dengan skor 69,72), IKP Kabupaten Kutai Timur tetap pada ranking 354 (dengan skor 57,58), sedangkan Kabupaten Kutai Barat rankingnya justru menurun dari ranking 313 (dengan skor 66,85) menjadi ranking 363 (dengan skor 54,98).

Demikian pula jika dipilah berdasarkan pilar ketahanan pangan, masing-masing satu termasuk zona hijau, kuning dan merah (Gambar 1). Pilar keterjangkauan pangan sudah mempunyai skor yang tinggi (89,25),

pilar pemanfaatan pangan juga mempunyai skor yang cukup tinggi (77,68), tetapi pilar ketersediaan pangan mempunyai skor yang relatif masih rendah (60,64) (Gambar 1). Jadi untuk upaya peningkatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur, pengelolaan pilar ketersediaan harus mendapat prioritas.



Gambar 1. Tiga pilar ketahanan pangan.

Upaya peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan hasil evaluasi terhadap status capaian kinerja, menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Secara umum tantangan atau kendala tersebut

dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek kendala, yaitu: 1) aspek alamiah, 2) aspek sosial-kultural, dan 3) aspek kebijakan.

Aspek alamiah yang dominan atau menonjol mempengaruhi upaya peningkatan dan mewujudkan ketahanan pangan secara mantap adalah (1) penurunan luas lahan dan kesuburan tanah, (2) fenomena perubahan iklim, (3) keterbatasan sumber air bersih, dan (4) peningkatan jumlah penduduk.

Aspek sosio-kultural merupakan aspek yang sangat dinamis mempengaruhi status ketahanan pangan di Kalimantan Timur, sehingga menimbulkan fakta yang paradoks di antara data-data variabel ketahanan pangan. Adapun beberapa aspek sosio-kultural penting adalah (1) perubahan pola konsumsi/diet, (2) kehilangan/pembuangan pangan, (3) harga pangan

yang cenderung tidak berpola, dan (4) daya beli masyarakat terhadap bahan pangan.

Aspek kebijakan merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya mewujudkan atau meningkatkan status ketahanan pangan di suatu wilayah atau daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi sebagai regulator dan fasilitator kegiatan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Adapun beberapa aspek kebijakan yang penting dan perlu mendapat perhatian adalah (1) Produksi pangan domestik (pilar ketersediaan); (2) hambatan distribusi, (3) perubahan transaksi ke *sistem on-line*.

Strategi peningkatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan terhadap berbagai tantangan dan kendala yang mencakup ketiga aspek tersebut di atas. Namun pengelolaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara simultan, karena dibatasi oleh sumber daya yang tersedia. Jadi implementasi strategi tersebut harus dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan ranking prioritas. Fokus sasaran implementasi strategi adalah peningkatan ketahanan pangan Kalimantan Timur secara mantap, sebagai “latihan” untuk siap menjawab tantangan sebagai penyangga pangan IKN.

1.1. Tujuan

Makalah ini disusun dengan tujuan melakukan penelaahan terhadap kondisi eksisting ketahanan pangan di Kalimantan Timur, dan upaya-upaya strategis peningkatan yang dapat dilakukan, serta tantangan yang dihadapi jika harus menjadi penyangga pangan untuk IKN.

1.2. Luaran

Berdasarkan analisis komparatif dan deskriptif terhadap kondisi eksisting ketahanan pangan di Kalimantan Timur, maka diformulasikan beberapa rancangan strategis untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan. Selanjutnya, luaran berupa rancangan strategis tersebut diharapkan dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan dalam bidang ketahanan pangan di Kalimantan Timur untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan di masa mendatang, dan sebagai persiapan Kalimantan Timur menjadi penyangga pangan IKN.

2. Kondisi Aktual Ketahanan Pangan

Sistem ketahanan pangan ditopang oleh tiga pilar, yaitu 1) pilar ketersediaan, 2) pilar keterjangkauan, dan 3) pilar pemanfaatan pangan. Seperti telah diuraikan di atas, kondisi aktual ketiga pilar ketahanan pangan tersebut di Kalimantan Timur tidak sama. Statusnya ada yang telah mencapai skor tinggi (pilar keterjangkauan pangan), tetapi ada pula pilar yang masih memiliki skor dengan kriteria rendah (pilar ketersediaan pangan), dan pilar pemanfaatan pangan mempunyai skor yang termasuk dalam kriteria sedang.

Jadi upaya peningkatan status ketahanan pangan (IKP) di Kalimantan Timur harus memperhatikan capaian kinerja pembangunan untuk masing-masing tiga pilar tersebut, dan prioritas peningkatan tentunya diarahkan pada pilar yang capaian kinerja atau skornya paling rendah. Berdasarkan data dan hasil evaluasi (Gambar 1), maka program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan harus difokuskan pada kinerja **pilar ketersediaan** dan **pilar pemanfaatan pangan**. Penguatan pilar ketersediaan

pangan yang ideal untuk Kalimantan Timur pada saat ini dan masa mendatang adalah melakukan peningkatan produksi pangan lokal yang menuju pada kemandirian pangan atau bahkan kedaulatan pangan.

Berkenaan dengan pilar keterjangkauan pangan, meskipun pilar ini di Kalimantan Timur telah mendapat penilaian dengan skor kriteria tinggi, kondisi aktual menunjukkan masih terdapat tiga kabupaten yang memiliki status ketahanan pangan rendah, yaitu Kabupaten Mahakam Hulu, Kutai Barat, dan Kutai Timur. Ditengarai untuk peningkatan status ketahanan pangan di ketiga kabupaten tersebut, ditinjau dari pilar keterjangkauan pangan, menghadapi kendala pada faktor distribusi, sistem logistik, stabilisasi pasokan dan harga. Kondisi demikian mempunyai hubungan dengan isolasi wilayah yang terdapat di tiga kabupaten tersebut.

2.1. Pilar Pemanfaatan Pangan

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, ditemukan beberapa kondisi paradoks pada status ketahanan pangan di Kalimantan Timur, antara lain sebagai berikut:

- 1) AKP di atas 100% (112,5%), tetapi kasus *stunting* masih tinggi (27,1%);
- 2) Tidak swasembada beras, tetapi kasus membuang pangan/beras tinggi (25%);
- 3) Kalimantan Timur eksportir ikan dan belanja pangan cukup, tetapi *stunting* tinggi.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut diketahui pula bahwa, persentase penduduk Kalimantan Timur yang berstatus atau dalam keadaan tidak cukup konsumsi pangan berkisar antara 4,98% (Kota Balikpapan)

hingga 10,17% (Kabupaten Paser) (Tabel 1). Data (Tabel 1) tersebut menunjukkan dua hal yang menarik ditinjau dari konsep ketahanan pangan, **pertama** persentase rata-rata penduduk yang berstatus tidak cukup konsumsi pangan kurang dari 10%, tetapi kasus *stunting* mencapai 27% fakta tersebut menunjukkan kompleksitas penyebab kasus *stunting* yang tidak saja disebabkan oleh faktor konsumsi. **Kedua** kasus penduduk yang termasuk status tidak cukup konsumsi pangan terdapat di kabupaten sentra produksi padi, yaitu Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara, yang secara berturut-turut menduduki ranking 1, 2, dan 3.

Tabel 1. Persentase penduduk kabupaten/kota di Kalimantan Timur dengan status tidak cukup konsumsi pangan tahun 2020.

No	Kabupaten / Kota	Penduduk (%)	Ranking
1	Paser	10,17	1
2	Penajam Paser Utara	10,15	2
3	Kutai Kartanegara	9,40	3
4	Kutai Barat	9,30	4
5	Kutai Timur	6,83	5
6	Mahakam Hulu	5,52	6
7	Samarinda	5,49	7
8	Berau	5,28	8
9	Bontang	5,06	9
10	Balikpapan	4,98	10

Fakta dan data seperti disajikan di atas merupakan informasi yang sangat penting untuk peningkatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur, digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan pada masa mendatang. Sehingga ketahanan pangan yang semakin mantap dapat diwujudkan di Kalimantan

Timur, untuk menuju pada kemandirian pangan atau bahkan kedaulatan pangan. Sehingga lebih siap menjadi penyangga pangan IKN.

2.2. Pilar Ketersediaan Pangan

Padi sebagai komoditas pangan utama produksinya di Kalimantan Timur dalam 10 tahun terakhir cenderung terus menurun (Tabel 2), sementara tingkat konsumsi terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Sehingga defisit kebutuhan beras terus meningkat selama 10 tahun terakhir (Gambar 2).

Tabel 2. Luas panen, produktivitas, dan produksi padi, serta statistik beras di Kalimantan Timur tahun 2010-2020.

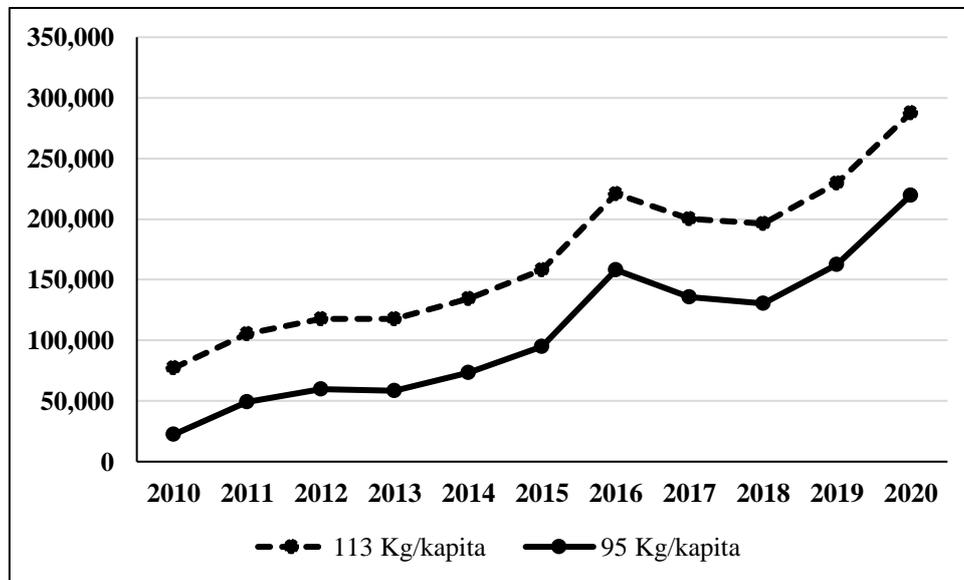
No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Luas panen (Ha)	110.379	100.826	101.960	102.912	100.262	99.209	80.343	94.393	96.723	94.698	72.253
2	Produktivitas (Kw/Ha)	41,63	42,20	41,65	42,70	42,51	41,20	38,00	37,79	37,21	38,01	36,38
3	Produksi GKG (ton)	459.475	425.504	424.669	439.439	426.169	408.782	305.337	356.680	359.905	359.905	262.856
4	Produksi beras (ton) Kaltim	293.605	271.897	271.363	280.802	272.322	261.212	191.904	224.173	237.581	209.826	152.107
5	Penyusutan beras (9%)	26.424	24.471	24.423	25.272	24.509	23.509	17.271	20.176	21.382	18.884	13.690
6	Total konsumsi (ton) 113 Kg/kapita	344.368	352.944	364.766	373.441	382.060	395.814	395.639	404.026	412.318	420.517	425.905
7	Total konsumsi (ton) 95 Kg/kapita	289.513	296.723	306.662	313.955	321.201	332.764	332.617	339.668	346.639	353.532	358.062
8	Surplus/deficit (ton) 113 Kg/kapita	77.187	105.518	117.825	117.912	134.247	158.111	221.006	200.029	196.119	229.575	287.488
9	Surplus/deficit (ton) 95 Kg/kapita	22.332	49.297	59.722	58.425	73.388	95.061	157.984	135.671	130.440	162.590	219.645

Catatan: konversi GKG ke beras 63,9%, konsumsi per kapita/tahun = 113 Kg atau 95 Kg.

Sumber: BPS Kaltim, 2016; dan Sidata BAPPEDA Kaltim, 2021.

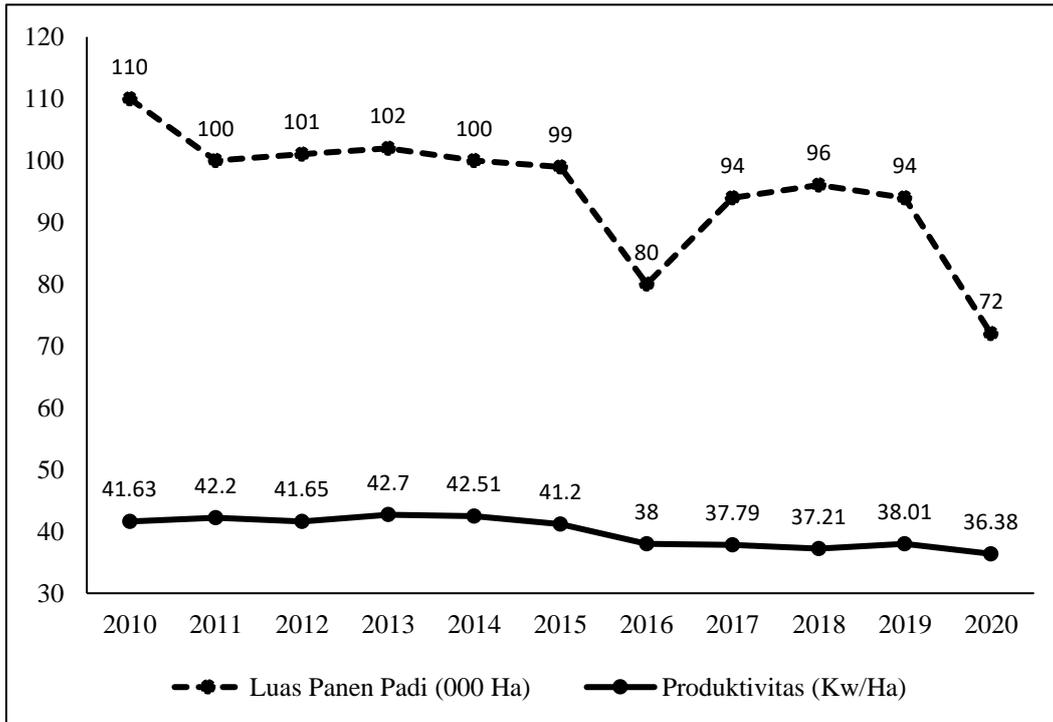
Fakta kecenderungan menurunnya produksi padi di Kalimantan Timur yang disajikan pada Tabel 2 merupakan gabungan antara produksi padi sawah dan padi ladang, tetapi untuk data tahun 2020 padi ladang tidak memberikan kontribusi terhadap produksi. Berdasarkan data dari BAPPEDA Kalimantan Timur (Sidata, 2021) diketahui bahwa, penurunan produksi padi di

Kalimantan Timur periode 2010-2020 dipengaruhi oleh menurunnya luas panen dan juga menurunnya produktivitas yang ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar 3.

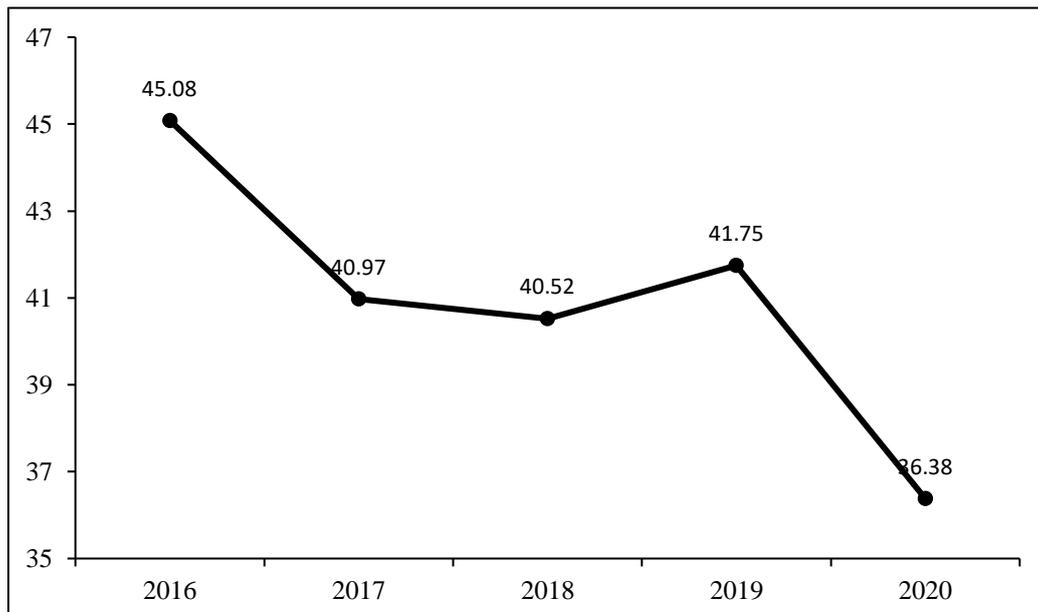


Gambar 2. Perkembangan defisit kebutuhan beras (ton) di Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: BPS Kaltim, 2016; dan Sidata BAPPEDA Kaltim, 2021).

Kondisi aktual menunjukkan bahwa sentra produksi padi di Kalimantan Timur adalah lahan sawah, sedangkan produksi padi ladang hanya sebagai pendukung. Kegiatan budidaya padi ladang yang masih menggunakan teknologi tebas dan bakar serta tidak menetap, ketersediaan lahannya semakin terbatas, karena terdesak oleh kegiatan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Namun produktivitas lahan sawah di Kalimantan Timur pada lima tahun terakhir cenderung menurun (Gambar 4). Sehingga pada saat kontribusi produksi dari padi ladang “tidak ada” pada tahun 2020, menimbulkan defisit kebutuhan beras meningkat menjadi > 60% (Tabel 2) baik untuk standar konsumsi 113 Kg/kapita maupun 95 Kg/kapita.



Gambar 3. Perkembangan luas panen dan produktivitas lahan padi di Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: BPS Kaltim, 2016; dan Sidata BAPPEDA Kaltim, 2021).



Gambar 4. Perkembangan produktivitas lahan padi sawah (Kw/Ha) di Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: Sidata BAPPEDA Kaltim, 2021).

Berdasarkan data yang tersedia seperti diuraian di atas, status produksi padi sebagai bahan pangan pokok di Kalimantan Timur belum mencapai swasembada, dengan defisit setara beras >60% dari kebutuhan konsumsi atau sekitar 219.645 ton (untuk tingkat konsumsi 95 Kg/kapita) hingga 287.488 ton (untuk tingkat konsumsi 113 Kg/kapita). Faktor pengendali produksi utama adalah terbatasnya luas sawah fungsional sebagai sentra produksi dan bahkan cenderung menurun, dan menurunnya produktivitas lahan sawah. Upaya meningkatkan produksi dengan meningkatkan IP (indeks pertanaman) terkendala oleh status dukungan sistem irigasi yang belum memadai. Jadi strategi peningkatan produksi pangan (utamanya padi) yang selama ini dijalankan perlu dievaluasi dan dikembangkan strategi alternatif yang dapat memecahkan atau mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi.

3. Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan

Penyusunan strategi peningkatan pangan yang disajikan berikut berpedoman pada elemen-elemen tiga pilar ketahanan pangan (Gambar 5). Adapun konsep untuk masing-masing ketiga pilar ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah sebagai berikut.

Pilar Ketersediaan. Ketersediaan yang dimaksud adalah ketersediaan fisik pangan di seluruh wilayah Indonesia yang diperoleh baik itu dari hasil produksi domestik, impor, atau perdagangan, maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau tingkat masyarakat.

Pilar Aksesibilitas. Akses yang dimaksud adalah kemampuan seluruh rumah tangga di Indonesia untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan maupun kombinasi di antara kelimanya. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin saja mencukupi,



Gambar 5. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2019).

tetapi hal ini tidak menjamin seluruh rumah tangga mendapatkan akses pangan yang memadai dan beragam.

Pilar Konsumsi atau Pemanfaatan. Konsumsi atau pemanfaatan yang dimaksud adalah penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangga dan kemampuan masing-masing individu untuk mengonsumsi pangan dan menyerap zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi kebersihan, distribusi makanan dalam

rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan lain-lain), dan status kesehatan masing-masing anggota rumah tangga.

Memahami kompleksitas faktor yang mempengaruhi perkembangan ketahanan pangan di Kalimantan Timur, maka penyusunan strategi peningkatan ketahanan pangan selain berpedoman pada elemen tiga pilar tersebut di atas, juga mempertimbangkan aspek alamiah, aspek sosio-kultural, dan aspek kebijakan. Ketiga aspek tersebut secara simultan mempengaruhi indikator dampak capaian kinerja ketahanan pangan, meskipun tidak secara langsung menjadi variabel indikator pilar ketahanan pangan. Berikut disajikan hubungan antara ketiga aspek kendala pengelolaan tersebut dengan elemen pilar ketahanan pangan untuk menyusun strategi pembangunan peningkatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

3.1. Aspek alamiah

Elemen produksi pangan domestik dari **pilar ketersediaan** merupakan elemen yang menjadi perhatian utama dan mempunyai hubungan erat dengan aspek alamiah. Secara global telah teridentifikasi bahwa faktor-faktor yang menjadi pembatas produksi komoditi pangan pada saat ini dan di masa mendatang adalah (1) penurunan luas lahan dan kesuburan tanah, (2) fenomena perubahan iklim, (3) keterbatasan sumber daya air.

Penurunan luas lahan pertanian pangan secara umum karena terjadi alih fungsi untuk kebutuhan pembangunan, seperti perumahan, infrastruktur, dan yang menonjol terjadi di Kalimantan Timur adalah

kegiatan penambangan batubara dan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan penurunan kesuburan tanah pertanian tanaman pangan adalah sebagai dampak implementasi revolusi hijau, dengan ketergantungan pada penggunaan input pabrikan yang tidak ramah lingkungan. Fakta penurunan produktivitas lahan pertanian pangan di Kalimantan Timur ditunjukkan oleh penurunan produktivitas lahan sawah sebagai lahan utama produksi padi (Tabel 2). Sedangkan sumber daya air di Kalimantan Timur secara potensial cukup besar, tetapi secara fungsional sangat terbatas, karena kondisi topografi wilayah yang tidak mendukung, jadi untuk memanfaatkan potensi air yang tersedia diperlukan investasi yang besar. Berkaitan dengan sumber daya air, kondisi di Kalimantan Timur diperparah dengan fenomena perubahan iklim yang menyebabkan distribusi curah hujan tidak teratur, yang berdampak pada pola tanam tanaman pangan khususnya komoditas padi menjadi tidak teratur pula, dan indeks pertanaman (IP) padi per tahun sulit dicapai targetnya.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk peningkatan level ketahanan pangan di Kalimantan Timur ditinjau dari aspek alamiah, diajukan beberapa rancangan strategis sebagai berikut:

- 1) Penguatan peraturan daerah untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan berbagai insentif yang mendorong petani berproduksi;
- 2) Pengembangan dan menerapkan teknologi budidaya tanaman pangan yang ramah lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan secara lestari;

- 3) Pembangunan irigasi sistem pompa untuk hamparan sawah fungsional dalam upaya meningkatkan IP padi sawah tadah hujan untukantisipasi fenomena perubahan iklim;
- 4) Pengembangan bahan pangan pokok alternatif yang dapat dibudidayakan pada lahan kering, seperti jelai, sorgum, ubi jalar, dan lain-lain.

3.2. Aspek sosio-kultural

Seluruh elemen pilar ketahanan pangan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi aspek sosio-kultural pengelolaan ketahanan pangan di Kalimantan Timur, sehingga muncul beberapa kondisi paradoks seperti diuraikan di atas. Tetapi elemen pilar keterjangkauan dan pilar pemanfaatan merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap aspek sosio-kultural ketahanan pangan. Faktor-faktor sosio-kultural yang sangat erat mempengaruhi ketahanan pangan di Kalimantan Timur adalah 1) daya beli masyarakat (tingkat kemiskinan), 2) akses terhadap pasar dan informasi, 3) distribusi pangan, dan 4) perbaikan pola konsumsi pangan.

Daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor kemiskinan dan meningkatnya harga bahan pangan akibat meningkatnya biaya distribusi atau terbatasnya ketersediaan (suplai) bahan pangan. Contoh aktual tingginya biaya distribusi (ongkos angkut) bahan pangan di Kalimantan Timur adalah untuk wilayah Kabupaten Mahakam Hulu, dan beberapa wilayah terpencil yang belum memiliki akses perhubungan darat dalam kondisi baik.

Akses terhadap pasar dan informasi, kondisi ini merupakan dampak dari panjangnya rantai pemasaran produk bahan pangan. Sehingga petani selalu memperoleh harga jualnya relatif rendah, dan sebaliknya selalu mendapatkan harga input produksi relatif tinggi. Dampaknya NTP (nilai tukar petani) tanaman pangan sangat sulit untuk ditingkatkan, yang selanjutnya mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk mencapai swasembada komoditas pangan sulit diwujudkan.

Faktor distribusi pangan mempunyai hubungan yang erat dengan daya beli masyarakat dan akses terhadap pasar dan informasi. Sedangkan secara fisik distribusi pangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan. Kondisi prasarana perhubungan di Kalimantan Timur pada kondisi tertentu (banjir atau kemarau) masih menghadapi kendala cukup berat.

Perbaikan pola konsumsi merupakan faktor sosio-kultural yang sangat kompleks mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Peningkatan diversifikasi pangan mungkin mempunyai peluang yang besar untuk dilakukan di Kalimantan Timur, tetapi memerlukan upaya promosi, penyuluhan yang intensif terhadap masyarakat. Kegiatan penyuluhan terhadap pola konsumsi, khususnya untuk baduta dan balita juga sangat penting untuk menurunkan status *stunting* di daerah ini. Oleh karena data menunjukkan bahwa kasus *stunting* tidak selalu terjadi untuk masyarakat miskin tetapi juga terjadi pada keluarga dengan kelas ekonomi menengah ke atas yang seharusnya tidak mengalami kekurangan konsumsi.

Kata kunci rancangan strategis untuk peningkatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur ditinjau dari aspek sosio-kultural adalah 1) pengentasan kemiskinan, 2) pembangunan infrastruktur perhubungan, dan 3) penyuluhan tentang implementasi pola konsumsi sehat. Adapun rancangan strategisnya secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan toko tani menjadi pasar *on-line* dan mendorong berkembangnya berbagai platform digital untuk memperpendek rantai pemasaran produk pertanian. Dampaknya petani mendapat harga jual yang lebih tinggi (dibandingkan penjualan lewat tengkulak tradisional) dan konsumen mendapat harga relatif lebih murah, membuka lapangan pekerjaan untuk jasa pengiriman barang, dan dampak ikutannya menurunkan jumlah orang miskin.
- 2) Membangun dan mengembangkan infrastruktur perhubungan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terutama dari dan ke wilayah yang pada saat ini masih termasuk kategori terpencil atau terisolasi.
- 3) Promosi, penyuluhan, dan pendampingan pola konsumsi sehat bagi masyarakat untuk mereduksi kasus *stunting* di seluruh Kalimantan Timur.
- 4) Melakukan pengawasan secara intensif terhadap keamanan dan mutu pangan segar dan pangan olahan.

3.3. Aspek Kebijakan

Pengelolaan ketahanan pangan yang memiliki tiga pilar (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) merupakan program lintas sektor dan

integrasi program dari beberapa OPD. Keberhasilan pengelolaan ketahanan pangan, berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan menjadi sumber PAD, serta menjaga kelestarian lingkungan agroekosistem tanaman pangan. Namun untuk mencapai level ketahanan pangan yang tinggi dan mantap diperlukan dukungan kebijakan yang kuat dan konsisten, seperti untuk merealisasikan beberapa rancangan strategis tersebut di atas.

Memperhatikan kondisi sistem ketahanan pangan global dan nasional, serta aspek alamiah seperti telah diuraikan di atas, maka ranking kebijakan untuk program strategis peningkatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan pilar ketersediaan pangan, khususnya untuk elemen produksi pangan domestik, hal ini untukantisipasi terhadap resiko menurunnya produksi pangan secara global dan nasional, akibat fenomena perubahan iklim dan menurunnya luas dan produktivitas lahan pertanian pangan. Alternatif kebijakannya adalah dengan mengembangkan bahan pangan pokok alternatif pada lahan kering dan pemanfaatan danau untuk budidaya padi terapung.
- 2) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian dan perhubungan untuk mendukung dan menjamin kelancaran distribusi pangan setiap keadaan sebagai elemen pilar keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat.
- 3) Mendukung berkembangnya **toko tani** menjadi sistem pasar *on-line* pusat distribusi sebagai upaya untuk memperpendek rantai

pemasaran produk pertanian (Gambar 6) agar petani dan konsumen mendapatkan manfaat lebih besar, serta menekan kejadian *food lost and wastes*. Alternatif kebijakannya adalah dengan membangun *integrated food hub center* untuk Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang dengan mengandalkan suplai utama produk pangan lokal dari daerah sekitar masing-masing kota.



Gambar 6. Sistem pemasaran produk pangan eksisting dan ideal.

4. Tantangan Sebagai Penyangga IKN

Kondisi eksisting ketahanan pangan Kalimantan Timur untuk menjadi penyangga pangan IKN mempunyai tantangan berat pada pilar ketersediaan, khususnya untuk elemen produksi pangan domestik. Selain peningkatan produksi, produk yang dihasilkan juga harus berkualitas tinggi, karena

untuk konsumsi masyarakat dengan kelas pendapatan menengah ke atas yang sudah mengutamakan pola konsumsi sehat.

Berdasarkan asumsi seperti tersebut di atas, maka tantangan yang dihadapi Kalimantan Timur untuk menjadi penyangga pangan IKN harus dipersiapkan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) peningkatan produksi berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan, karena hingga saat ini banyak komoditas pangan yang belum dapat dipenuhi secara swasembada;
- 2) penerapan SOP *good agricultural practices* untuk menghasilkan produk pangan yang berkualitas tinggi, melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelompok tani secara intensif;
- 3) perwilayahan komoditas tanaman pangan berdasarkan kesesuaian ekologis, agar produktivitas dan kontinuitas produksi setiap komoditas dapat dipertahankan secara berkelanjutan; dan,
- 4) penguatan kinerja kelompok tani agar dapat mendukung dan merealisasikan ketiga strategi tersebut di atas.

Daftar Pustaka

- BPS Kaltim. 2016. Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2016. BPS Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- _____. 2020. Statisti Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur. BPS Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- _____. 2021. Nilai Tukar Petani (NTP).
<https://kaltim.bps.go.id/indicator/22/123/1/rata-rata-nilai-tukar-petani-ntp-.html>
- FAO, 2014. Building a Common Vision for Sustainable Food and Agriculture: Principles and Approaches. Rome.

- RPJMD, 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- Saragih, B. 2021. Evaluasi Ketahanan Pangan KALTIM dan Tantangan Sebagai Penyangga IKN. Makalah disajikan pada: Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan KALTIM, di Maratua, 21-23 November 2021. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- Sidata, 2021. Sidata - Sistem Informasi Data Kalimantan Timur, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur.
<https://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/dataprofil/dataku/159?cari=produksi%20padi>
- Susanto, A.N. 2021. Situasi dan Peningkatan Fungsi Ketahanan Pangan Sesuai Perpres 66/2021 Mendukung Kalimantan Timur Sebagai Ibukota Negara. Makalah disajikan pada: Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan KALTIM, di Maratua, 21-23 November 2021. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.



Danau Kakaban Kabupaten Berau